

Redefinisi Pola Asuh Pesantren: Strategi Mitigasi Kekerasan Terhadap Santri

Ratu Dian Hatifah¹, Alfian Huda², Nailatin Fauziyah³

^{1,2} Universitas Brawijaya, ³ Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

^{1,2} Jl. Veteran No.10-11, Ketawanggede, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur, Indonesia, 65145,

³ Jl. Ahmad Yani No.117, Jemur Wonosari, Kec. Wonocolo, Surabaya, Jawa Timur, Indonesia 60237

¹ratudianhatifah@student.ub.ac.id, ²Alfianhuda085@gmail.com, ³nailatin.fauziyah@uinsa.ac.id

Abstrak

Kekerasan di pesantren telah menjadi masalah yang mengkhawatirkan, praktik tersebut seakan dibiarkan karena dianggap bagian dari pembentukan karakter. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik wawancara, observasi partisipatif, serta telaah dokumen. Data dianalisis menggunakan software QDA Miner. Hasil penelitian menemukan tiga temuan utama. Pertama, praktik kekerasan yang terinstitusional masih berlangsung yang dilegitimasi sebagai sarana kedisiplinan. Kedua, terdapat perbedaan pemaknaan pola asuh dalam budaya pesantren. Ketiga, penataan ulang pola asuh menjadi strategi penting untuk mitigasi kekerasan. Temuan ini memperlihatkan perlu ada pembaharuan antara tradisi lama yang melegitimasi kekerasan dengan tuntutan modern atas pendidikan ramah anak. Redefinisi pola asuh bukan hanya soal perubahan teknis, tetapi juga transformasi nilai yang menegaskan pesantren sebagai lembaga pendidikan yang berorientasi pada rahmat, perlindungan, dan pengembangan potensi santri. Dengan demikian, penelitian ini bisa menjadi perluasan pandangan bahwa model pola asuh humanis-integratif merupakan strategi efektif dalam mitigasi kekerasan dan relevan untuk mengembangkan pesantren yang selaras dengan nilai rahmatan lil-'alamin.

Kata kunci: Pola Asuh Pesantren; Strategi Mitigasi Kekerasan; Santri

Redefining the Boarding School Parenting Model: Strategies for Mitigating Violence Against Students

Abstract

Violence in Islamic boarding schools has become a worrying problem, with such practices seemingly tolerated because they are considered part of character building. This study uses a qualitative approach with interview techniques, participatory observation, and document analysis. Data were analyzed using QDA Miner software. The study found three main findings. First, institutionalized violence continues to be practiced and legitimized as a means of discipline. Second, there are differences in the interpretation of parenting patterns in pesantren culture. Third, restructuring parenting patterns is an important strategy for mitigating violence. These findings show the need for a renewal between old traditions that legitimize violence and modern demands for child-friendly education. Redefining parenting is not only a matter of technical change, but also a transformation of values that affirms Islamic boarding schools as educational institutions oriented towards mercy, protection, and the development of students' potential. Thus, this study can broaden the view that a humanistic-integrative parenting model is an effective strategy in mitigating violence and is relevant for developing Islamic boarding schools that are in harmony with the values of rahmatan lil-'alamin.

Keywords: Islamic Boarding School Parenting, Violence Mitigation Strategy, Students

Pendahuluan

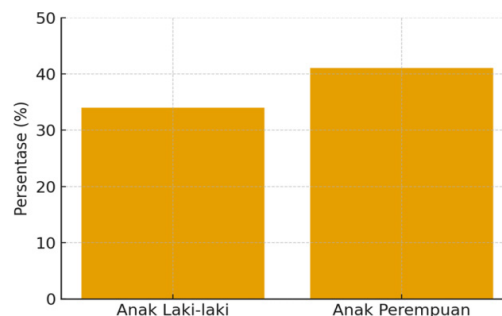
Peristiwa kekerasan pada lingkungan pesantren semakin mengkhawatirkan dan mempengaruhi citra negatif terhadap pesantren sebagai lembaga pendidikan bagi tumbuh kembang anak (Aprilia et al., 2022; Gunawan et al., 2024; Natsir & Rohman, 2024; Nurish, 2019). Praktik kekerasan yang terinstitusionalisasi ini berpotensi melahirkan siklus reproduksi kekerasan, di mana santri yang pernah menjadi korban kemudian bertransformasi menjadi pelaku.

Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (SNPHAR) Tahun 2021 menunjukkan fakta mencengangkan: sebanyak 34% anak laki-laki dan 41,05% anak perempuan di Indonesia pernah mengalami salah satu bentuk kekerasan sepanjang hidupnya. Angka ini menegaskan bahwa hampir separuh generasi muda Indonesia telah bersentuhan langsung dengan pengalaman traumatis yang seharusnya tidak mereka alami.

Temuan ini diperkuat oleh data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) tahun 2021 yang mencatat sedikitnya 1.138 anak menjadi korban kekerasan, baik fisik maupun psikis, dalam rentang satu tahun. Tidak berhenti di situ, laporan KPAI juga menempatkan kasus kekerasan anak sebagai bentuk pelanggaran tertinggi dibandingkan dengan kasus lain, seperti eksploitasi, penelantaran, atau masalah hak sipil anak (bankdata.kpai.go.id).

Sosiolog Universitas Indonesia Ida Ruwaida menyikapi kasus kekerasan yang terjadi di lingkungan pesantren. Menurutnya, hal ini tidak terlepas dari beberapa faktor. Pertama, kultur atau tradisi pesantren yang paternalistik. Kedua,

adanya anggapan bahwa kekerasan adalah bagian dari media pembelajaran. Ketiga, dilema antara rasa solidaritas warga pesantren dengan literasi kemanusiaan. Dan terakhir, minimnya pemahaman tentang keberagaman.



Gambar: Persentase anak yang mengalami kekerasan

Sejauh ini studi tentang sosiologi pesantren cenderung melihat tiga isu utama pertama relasi kuasa santri dan kyai (Arifin, 2024; Hania et al., 2022; Pebriaisyah et al., 2022; Rofidah & Syam, 2021). kedua, pendidikan karakter santri (Hania et al., 2022; Mustofa, 2017), ketiga tradisi atau kultur pesantren (Dewantoro, 2020; Ernawati, 2022; Nashihah, 2022; Rofidah & Syam, 2021). Relasi kuasa santri dan kiai menunjukkan bahwa, relasi kiai dan santri bukan hanya mengatur kehidupan sehari-hari di pesantren, tetapi juga berimplikasi pada pola kepemimpinan kiai yang cenderung paternalistik serta membentuk loyalitas yang berlebihan (Hidayatullah, 2024).

Sementara pendidikan karakter santri menegaskan bahwa pesantren berperan signifikan dalam membangun nilai moral, kedisiplinan, dan sikap religius santri melalui praktik pembiasaan, dan keteladanan kiai sebagai figur sentral. Dan tradisi atau kultur pesantren menunjukkan

bahwa turut serta dalam menciptakan terjadinya tindak kekerasan melalui senioritas yang terjadi di lingkungan pesantren (Dewantoro, 2020). Dari ketiga kecenderungan di atas tampak bahwa studi sosiologi pesantren masih terfokus pada aspek relasi kuasa, pendidikan karakter, dan kultur pesantren, sehingga belum banyak menyinggung dimensi pengasuhan yang dijalankan di lingkungan pesantren. Padahal, kajian tentang pola asuh di pesantren sangat penting karena dapat menjadi strategi mitigasi kekerasan terhadap santri, sekaligus membuka ruang untuk memahami bagaimana praktik pengasuhan berkontribusi pada terciptanya iklim pendidikan yang lebih humanis, dan bebas dari tindak kekerasan.

Penelitian ini bertujuan melengkapi keterbatasan dari studi yang ada, yang tidak mengakomodasi dimensi pola asuh di pesantren sebagai upaya mitigasi kekerasan. Kekhasan penelitian ini terletak pada fokusnya untuk melihat pola asuh bukan hanya sebagai bagian dari pendidikan moral atau pembiasaan religius, tetapi juga sebagai upaya membangun iklim pendidikan yang aman dan ramah anak. Sejalan dengan itu, tulisan ini bertujuan untuk mendefinisikan ulang tentang pola asuh di pesantren sebagai strategi mitigasi kekerasan, serta menganalisis kontribusinya dalam membangun iklim pendidikan yang lebih humanis. Jawaban atas pertanyaan tersebut memungkinkan diperoleh suatu pengetahuan yang mendalam tentang bagaimana pola asuh di pesantren berfungsi sebagai mekanisme pencegahan kekerasan sekaligus pembentukan karakter santri.

Pengetahuan ini dapat menjadi perluasan pandangan mengenai

pendidikan pesantren yang tidak hanya berfokus pada aspek religiusitas, tetapi juga pada penguatan dimensi psikososial dan perlindungan anak dalam lingkungan pendidikan. Sekaligus dapat memperkaya diskursus pendidikan di pesantren dan membuka peluang bagi pengembangan model pendidikan ramah anak yang tetap adaptif terhadap prinsip-prinsip hak asasi manusia.

Pesantren harus mengevaluasi praktik pendidikan yang telah usang. Dalam konteks ini, pesantren perlu menempatkan santri sebagai subjek pendidikan, bukan semata objek. Transformasi ini menegaskan bahwa tradisi pesantren yang selama ini dianggap kaku dapat berjalan beriringan dengan paradigma pendidikan modern. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi akademik dalam memperluas pemahaman tentang pola asuh di pesantren sebagai strategi mitigasi kekerasan, tetapi juga menghadirkan landasan konseptual dan praktis bagi pengembangan pendidikan ramah anak di lingkungan pesantren. Temuan penelitian ini berpotensi memperkuat paradigma bahwa pola asuh bukan sekadar instrumen pendidikan secara normatif, melainkan fondasi penting dalam menciptakan iklim yang aman, untuk tumbuh kembang santri. Sehingga pesantren dapat tetap relevan dengan tantangan zaman.

Metode Penelitian

Analisis data dalam penelitian ini dilaksanakan secara kualitatif dengan dukungan perangkat lunak QDA Miner yang berfungsi untuk proses pengkodean serta pengelompokan temuan. Tahapan

analisis disusun secara sistematis, dimulai dari transkripsi wawancara hingga penarikan tema inti. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan terpilih, direkam, lalu ditranskripsikan verbatim untuk menjaga keaslian informasi. Transkrip tersebut selanjutnya dimasukkan ke dalam QDA Miner sebagai dokumen analisis utama. Tahap awal melibatkan open coding, yakni pembacaan transkrip dan pemberian label pada bagian data yang relevan. Kode ini bersifat deskriptif dan muncul langsung dari narasi informan, tanpa dibatasi kerangka teori tertentu. Setelah itu, dilakukan kategorisasi, yaitu pengelompokan kode yang memiliki keterkaitan makna ke dalam kategori atau subtema yang lebih luas. Proses ini membantu membangun struktur data yang lebih teratur dan konseptual. Tahap akhir berupa retrieval dan analisis tematik, di mana tema inti (core category) diidentifikasi untuk mengintegrasikan keseluruhan narasi sekaligus menjawab fokus penelitian. Hasil akhir kemudian divisualisasikan guna memperjelas temuan penelitian.

Pendekatan ini dipilih karena mampu menggali secara mendalam pengalaman, praktik, dan dinamika pola asuh di pesantren yang berkaitan dengan fenomena kekerasan terhadap santri. Fokus penelitian diarahkan pada pemahaman kontekstual tentang bagaimana pesantren merumuskan, menerapkan, dan mendefinisikan pola asuh sebagai strategi mitigasi kekerasan, sehingga peneliti dapat menangkap kompleksitas hubungan antara pengasuh, ustadz/ustadzah, dan santri dalam kehidupan sehari-hari. Wawancara dilakukan kepada pengasuh pesantren,

ustadz/ustadzah, pengurus, serta santri yang menjadi aktor utama dalam proses pendidikan dan pengasuhan. Observasi partisipatif dipakai untuk memahami praktik keseharian, interaksi, serta nilai-nilai yang diinternalisasi dalam lingkungan pesantren. Sementara itu, dokumentasi digunakan untuk menelusuri regulasi internal, tata tertib, maupun catatan terkait penanganan kasus kekerasan yang pernah terjadi. Sementara untuk lokasi penelitian dipilih di Jombang, Jawa Timur, yang dikenal sebagai salah satu pusat perkembangan pesantren di Indonesia. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan historis, kultural, dan keragaman model pengasuhan yang ada, sehingga memberikan konteks yang kaya untuk menggali fenomena yang diteliti (Hasan et al., 2023; Sobari, 2023; Tawakkal, 2023).

Hasil dan Pembahasan

Praktik Kekerasan yang Terinstitusional

Hasil penelitian di pesantren Jombang menunjukkan bahwa pola asuh yang diterapkan masih didominasi oleh pendekatan otoriter dan tradisional. Hal ini tampak dari struktur relasi yang hierarkis antara kiai, ustaz, dan santri, di mana kiai menempati posisi sebagai figur sentral yang harus ditaati tanpa ruang dialog yang setara. Model pengasuhan ini tercermin dalam praktik disiplin yang ketat, seperti pemberian hukuman fisik maupun verbal ketika santri melanggar aturan.

Secara empiris, pola asuh tersebut menunjukkan warisan pendidikan tradisional pesantren, yang menekankan kepatuhan, dan penghormatan mutlak. Pola asuh tradisional yang masih otoriter berpotensi melanggar praktik

kekerasan sebagai instrumen pendidikan untuk mendisiplinkan santri, bisa berimplikasi pada kesehatan psikologis santri serta menghambat proses tumbuh kembang santri secara optimal.

Pengasuh pesantren memperlihatkan bahwa alasan utama masih bertahannya pola asuh otoriter adalah legitimasi kultural dan keyakinan bahwa metode disiplin keras merupakan cara efektif membentuk karakter santri. Namun, data lapangan menunjukkan adanya kesenjangan antara maksud pengasuh dan pengalaman santri, di mana sebagian santri merasa takut, tertekan, bahkan mengalami trauma akibat praktik kekerasan. Kontradiksi ini memperlihatkan bahwa pola asuh otoriter merupakan cara usang, namun masih eksis dilingkungan pesantren. Hal ini bukan hanya persoalan metodologi pendidikan, melainkan juga berkaitan dengan reproduksi relasi kuasa yang tidak seimbang di lingkungan pesantren.

Hal ini tercermin dari praktik pengasuhan yang menekankan kepatuhan penuh kepada kiai, ustadz, dan senior (musyrif) tanpa banyak ruang untuk berdialog atau mempertanyakan keputusan. Metode yang digunakan lebih menekankan pada instruksi sepihak,

kedisiplinan ketat, serta sanksi tegas bagi santri yang melanggar aturan. Pola ini berakar kuat pada tradisi kepesantrenan yang mengedepankan penghormatan hierarkis, sehingga relasi antara pengasuh dan santri lebih bersifat top-down daripada partisipatif. Kecenderungan pola asuh tersebut memperlihatkan bahwa otoritarianisme masih menjadi pola dominan. Kecenderungan ini dapat dijelaskan oleh adanya faktor historis, kultural, dan struktural dalam pesantren. Secara historis, pola asuh semacam ini diwariskan dari generasi ke generasi sebagai bentuk menjaga disiplin dan tradisi keilmuan klasik. Secara kultural, penghormatan terhadap kiai dan ustadz dipandang sebagai bentuk ta'dzim yang tidak boleh diganggu gugat. Sementara secara struktural, jumlah santri yang besar dengan pengasuh terbatas membuat pendekatan otoriter dianggap lebih efektif dalam menjaga keteraturan. Namun, dalam konteks modern yang menuntut pendekatan pendidikan ramah anak, pola asuh seperti ini menimbulkan problem, yakni risiko terjadinya kekerasan verbal maupun fisik, serta rendahnya ruang partisipasi santri dalam proses pendidikan.

1. Open Coding

Kategorisasi	Code	Argumen Kunci
Kekerasan yang terinstitusional	Kekerasan Verbal	1. Karena sudah terbiasa atau menjadi budaya seperti itu, akhirnya menerima karena menganggap itu sudah budaya pesantren.
	Psikologis	1. Saya berharap pesantren bisa menata ulang pola asuh, supaya disiplin tetap ada tapi caranya lebih manusiawi dan mendidik. 2. Banyak yang meyakini bahwa metode keras akan membentuk karakter santri yang Tangguh. Namun semakin kesini car aini

		sudah tidak lagi relevan dengan perkembangan zaman. 3. Kalau terus menerus ada kekerasan, santri bisa trauma. Bahkan lebih memilih keluar dari pesantren.
	Struktural	1. Kekerasan dalam bentuk apapun seharusnya tidak menjadi bagian dari Pendidikan, jika didalamnya ada praktik kekerasan maka itu jelas bertentangan dengan nilai islam yang rahmatan lil-alamin.

Sumber: Diolah peneliti melalui QDA Miner

Praktik hukuman fisik seperti push-up, bersih-bersih toilet, hingga teguran keras di hadapan teman-teman. Seringkali menciptakan pengalaman traumatis bagi sebagian santri, terutama yang masih berusia remaja awal. Meski dimaksudkan untuk menanamkan kedisiplinan dan kepatuhan terhadap aturan, pola ini memperlihatkan bahwa otoritas pengasuhan di pesantren masih sangat konservatif. Studi terdahulu mencatat bahwa pola otoriter memang mampu menumbuhkan ketaatan, tetapi sering mengabaikan aspek perkembangan emosional anak. Dalam konteks pesantren, penerapan disiplin keras sering dipandang sebagai bagian dari tradisi kaderisasi moral, padahal jika tidak dikontrol dapat bergeser menjadi praktik kekerasan yang terus menerus dinormalisasi.

Praktik tersebut menimbulkan dilema, di satu sisi menjaga ketertiban, di sisi lain menimbulkan resistensi pada santri. Kecenderungan ini dapat dijelaskan melalui kerangka budaya pesantren yang masih menjunjung tinggi hierarki antara kiai, ustadz, dan santri. Relasi kuasa yang asimetris membuat santri sulit menyuarakan atas perlakuan senioritas. Kondisi ini semakin diperkuat dengan legitimasi budaya "ta'dzim" yang mengharuskan santri menerima semua bentuk arahan guru tanpa protes. Praktik disiplin keras ini berfungsi sebagai

mekanisme kontrol terhadap tubuh dan perilaku. Temuan ini menunjukkan perlunya reposisi pola disiplin dalam pesantren. Kedisiplinan memang mutlak dibutuhkan, tetapi perlu dialihkan dari pola hukuman fisik ke pendekatan yang lebih edukatif dan humanis, seperti dengan konseling, pembinaan melalui kedekatan emosional, Chemistry, atau pemberian tanggung jawab kolektif.

Dalam sejumlah pesantren, praktik kekerasan baik berupa hukuman fisik maupun verbal, masih dianggap sebagai bagian wajar dari mekanisme pendidikan. Tindakan tersebut dipersepsikan sebagai sarana untuk menanamkan kedisiplinan, kepatuhan, serta daya tahan mental pada santri. Normalisasi ini tidak hanya datang dari pihak pengasuh atau ustadz, tetapi juga diterima oleh sebagian santri yang menganggap hukuman keras sebagai bagian dari tradisi pendidikan pesantren yang telah diwariskan secara turun-temurun.

Kecenderungan yang muncul adalah terbangunnya kultur di mana kekerasan diposisikan sebagai instrumen pendidikan karakter. Hal ini mengakibatkan adanya legitimasi sosial terhadap praktik kekerasan yang seharusnya dikritisi. Dengan kerangka pendidikan karakter, kekerasan justru mendapatkan ruang pembenaran moral dan religius. Akibatnya, potensi terjadinya

reproduksi praktik kekerasan semakin kuat, karena santri yang mengalami perlakuan keras berisiko menginternalisasi cara tersebut sebagai metode kelak ketika mereka menjadi pengasuh atau pendidik.

Sistem pendidikan berbasis kekerasan cenderung membentuk kepatuhan semu, alih-alih membangun kesadaran kritis. Kekerasan yang dinormalisasi bukan hanya mengaburkan batas antara disiplin dan pelanggaran hak asasi, tetapi juga berpotensi menimbulkan dampak psikologis jangka panjang, seperti trauma, penurunan rasa percaya diri, hingga reproduksi pola relasi hierarkis yang timpang. Klaim bahwa kekerasan mendidik karakter perlu ditinjau ulang, karena lebih banyak melestarikan kultur kekuasaan daripada membentuk karakter santri. Namun demikian, sebagian besar santri cenderung menerima praktik kekerasan atau disiplin keras yang terjadi di lingkungan pesantren. Penerimaan ini muncul bukan semata karena mereka tidak merasakan ketidaknyamanan, tetapi lebih karena adanya konstruksi budaya yang telah lama melekat.

Santri sering memaknai pengalaman tersebut sebagai ujian mental yang harus dilalui agar dapat menjadi pribadi yang lebih kuat. Hal ini menunjukkan bahwa persepsi santri terhadap kekerasan tidak selalu dilihat dalam kaca mata pelanggaran, tetapi justru dimaknai sebagai bagian dari perjalanan belajar. Pola transmisi nilai ini menumbuhkan sikap pasrah dan konformitas, di mana santri baru merasa harus mengikuti apa yang sudah menjadi tradisi. Kekerasan yang seharusnya dipersoalkan justru mengalami proses normalisasi melalui legitimasi sosial dari generasi sebelumnya.

Fenomena ini sekaligus memperlihatkan adanya rantai reproduksi budaya kekerasan yang sulit diputus, karena diterima sebagai bagian dari identitas dan kebanggaan hidup di pesantren. Penerimaan santri bukanlah cerminan dari persetujuan yang tulus, melainkan bentuk adaptasi terhadap situasi yang dianggap tidak dapat diubah. Hal tersebut memperlihatkan bagaimana kekerasan dalam pola asuh pesantren bertransformasi menjadi sebuah budaya kepatuhan. Oleh karena itu perlu adanya penataan ulang pola asuh tanpa harus menghilangkan nilai-nilai kedisiplinan yang menjadi ciri khas pesantren.

Pemaknaan Pola Asuh dalam Budaya Pesantren

Dalam konteks budaya pesantren, pola asuh tidak hanya diartikan sebagai relasi orang tua dan anak, melainkan sebagai relasi guru dan murid yang diwarnai dengan hierarki otoritas. Kiai dipandang sebagai figur pengganti orang tua yang berhak membimbing, mengawasi, bahkan memberi hukuman. Namun, pemaknaan ini kerap menimbulkan dilema, di satu sisi santri belajar tunduk pada otoritas, tetapi di sisi lain, praktik yang terlalu keras dapat mengarah pada bentuk kekerasan simbolik maupun fisik.

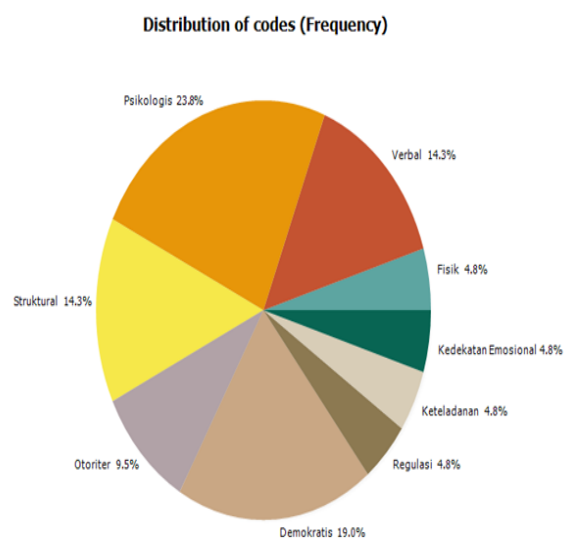
Pemaknaan pola asuh dalam budaya pesantren perlu dilihat sebagai ruang dialektika antara ketundukan dan kebutuhan akan perlindungan hak-hak santri. Selain itu fakta dilapangan menunjukkan, adanya miskonsepsi di lingkungan pesantren tentang disiplin dan kekerasan. Sebagian besar pengasuh dan pengurus pesantren masih memaknai

disiplin sebagai kepatuhan mutlak yang harus ditegakkan melalui kekerasan untuk mengontrol perilaku, bahkan dengan cara-cara koersif. Pola asuh yang semacam ini berpotensi menjadi justifikasi terhadap praktik pembenaran dari segala perilaku. Hal ini menunjukkan, pola asuh di pesantren perlu ditata ulang agar lebih adaptif terhadap nilai-nilai pendidikan yang ramah anak.

Kalangan senior di pesantren cenderung mempertahankan pola asuh tradisional yang menoleransi hukuman fisik sebagai wujud kasih sayang keras (tough love). Sementara itu, generasi muda yang lebih terpapar dengan wacana pendidikan modern dan perlindungan anak mulai mempertanyakan relevansi pendekatan tersebut. Perbedaan pandangan ini sering menimbulkan ketegangan internal. Padahal, disiplin sejatinya tidak identik dengan kekerasan, melainkan berkaitan erat dengan pembentukan karakter melalui teladan, penguatan nilai, dan pembiasaan perilaku positif. Ketika hukuman keras ditempatkan sebagai metode utama, pesantren justru berisiko kehilangan esensi pendidikan moral yang seharusnya berlandaskan kasih sayang, kearifan, dan pembimbingan. Disiplin berbasis kekerasan juga menimbulkan dampak psikologis jangka panjang pada santri, seperti trauma, ketakutan, hingga penurunan kepercayaan pada pesantren.

Oleh karena itu, hal ini semakin menegaskan perlunya reorientasi pola asuh pesantren dengan membedakan secara tegas antara disiplin dan kekerasan. Disiplin harus dipahami sebagai pembinaan yang konsisten, edukatif, dan berfokus pada pembentukan tanggung

jawab santri, sementara kekerasan harus dilihat sebagai bentuk penyimpangan yang mengancam misi pesantren sebagai lembaga pendidikan. Upaya mitigasi dapat dilakukan melalui penyusunan kode etik pengasuhan, pelatihan pengajar dalam pendekatan pendidikan ramah anak, serta penciptaan budaya musyawarah antara pengasuh, santri, dan wali santri.



Sumber: Diolah Peneliti

Grafik pie chart ini menunjukkan distribusi frekuensi kode yang muncul dari proses analisis data kualitatif menggunakan QDA Miner. Setiap kode merepresentasikan isu atau tema yang ditangkap dari transkrip wawancara mengenai pola asuh dan kekerasan di pesantren. Hasil analisis data menggunakan QDA Miner menunjukkan bahwa bentuk kekerasan yang paling dominan dialami santri di pesantren berada pada ranah psikologis dengan persentase 23,8%.

Temuan ini menegaskan bahwa tekanan mental, intimidasi, dan perlakuan yang merendahkan lebih sering dialami dibandingkan bentuk kekerasan fisik.

Praktik kekerasan verbal dan struktural masing-masing sebesar 14,3% masih menunjukkan bahwa kekerasan melalui ucapan merendahkan serta kebijakan hierarkis yang kaku tetap menjadi realitas yang dihadapi santri. Pola otoriter juga masih ditemukan dengan angka 9,5%, memperlihatkan bahwa sebagian pengasuhan masih dijalankan melalui pendekatan kontrol ketat dan hukuman tanpa ruang dialog.

Di sisi lain, meskipun dalam proporsi kecil (masing-masing 4,8%), terdapat temuan terkait kekerasan fisik. Oleh karena itu, merespon dari permasalahan tersebut, berdasar dari temuan menginginkan pola asuh yang lebih demokratis. Pola demokratis muncul dengan frekuensi cukup tinggi, yakni 19,0%, yang mengindikasikan adanya ruang dua arah dalam proses pembelajaran. Selain itu, pondok pesantren dan pengasuh bisa memitigasi kasus kekerasan bisa melalui regulasi dan pendekatan emosional pada santri.

Pola asuh pesantren yang mengandalkan pendekatan keras, membawa konsekuensi yang kontradiktif terhadap tujuan pendidikan Islam itu sendiri. Santri memang tampak lebih patuh secara lahiriah, namun kepatuhan tersebut sering kali muncul dari rasa takut, bukan kesadaran nilai. Dalam beberapa kasus, santri cenderung menunjukkan sikap tunduk di hadapan guru, tetapi menyimpan resistensi yang dapat memengaruhi perkembangan karakter mereka. Selain itu, praktik kekerasan dalam pola asuh ini berpotensi mengerdilkan makna pendidikan Islam yang seharusnya berlandaskan pada prinsip kasih sayang, kebijaksanaan, dan keteladanan. Tujuan

luhur pesantren untuk melahirkan pribadi Muslim yang mampu menginternalisasi ajaran Islam sebagai rahmatan lil-'alamin justru tereduksi.

Memperlihatkan adanya jarak yang semakin jauh antara praktik pola asuh keras dengan esensi pendidikan Islam. Pesantren sejatinya bertujuan menyiapkan generasi Muslim yang tidak hanya menguasai ilmu agama secara teoritis, tetapi juga mampu menerjemahkan ajaran Islam ke dalam praktik sosial. Pergeseran ke pola asuh yang lebih humanis bukan berarti mengabaikan kedisiplinan, melainkan menempatkan disiplin sebagai sarana pembentukan karakter, bukan sekadar alat kontrol.

Konsep pengasuhan di pesantren bukan sekadar sebuah upaya teknis untuk mendidik santri, melainkan merupakan proses kompleks yang sarat dengan makna. Pengasuhan diartikan sebagai serangkaian tindakan yang bertujuan membentuk fondasi nilai, karakter, dan identitas keislaman santri melalui pendekatan yang berkesinambungan.

Dalam konteks ini, pengasuhan mencakup lima aspek utama yang saling melengkapi, yaitu Aspek Keteladanan Moral, Aspek Komunikasi Edukatif, Aspek Disiplin Humanis, Aspek Pengembangan Potensi Santri, Aspek Perlindungan dan Kesejahteraan Santri. Aspek keteladanan moral menempati posisi fundamental dalam pola asuh pesantren, karena kyai dan pengasuh berfungsi bukan sekadar pemberi instruksi, tetapi sebagai figur panutan yang menjadi rujukan utama perilaku santri. Keteladanan ini mencakup sikap sabar, adil, rendah hati, serta kasih sayang yang ditunjukkan secara konsisten dalam kehidupan sehari-hari.

Dengan menghadirkan otoritas berbasis moral, pesantren dapat membangun hubungan yang harmonis antara pengasuh dan santri, sekaligus menekan praktik kekerasan yang biasanya lahir dari pola kepemimpinan otoriter. Aspek komunikasi edukatif menekankan pentingnya interaksi yang dialogis dan partisipatif antara kyai, pengasuh, dan santri. Pola komunikasi yang sehat, baik verbal maupun nonverbal, memungkinkan terciptanya ruang belajar yang inklusif, di mana santri merasa didengar dan dihargai. Pendekatan ini tidak hanya memperkuat ikatan emosional, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme resolusi konflik yang lebih konstruktif, sehingga mampu mengurangi potensi munculnya kekerasan yang sering terjadi akibat kesalahpahaman atau perintah yang bersifat satu arah.

Aspek disiplin humanis merupakan bentuk penegakan aturan yang tetap konsisten, tetapi tidak lagi mengandalkan hukuman fisik atau kekerasan. Disiplin ini dijalankan melalui pembiasaan, konsekuensi logis, dan penguatan positif yang mendidik. Dengan demikian, santri dapat memahami nilai kedisiplinan sebagai bagian dari pembentukan karakter, bukan sebagai bentuk intimidasi. Pendekatan ini menegaskan garis pemisah antara pendidikan disiplin dan praktik kekerasan, sehingga pesantren mampu mempertahankan ketertiban tanpa mengorbankan kesejahteraan psikologis santri. Aspek pengembangan potensi santri berorientasi pada pengasuhan yang holistik, di mana pesantren tidak hanya menekankan aspek religius semata, tetapi juga memberi ruang bagi pengembangan intelektual, emosional, sosial, dan

keterampilan praktis. Pengasuhan yang demikian memungkinkan santri tumbuh sebagai pribadi yang mandiri, percaya diri, dan mampu berkontribusi di tengah masyarakat.

Dengan menghargai keragaman bakat, pesantren dapat menghindari praktik pemaksaan yang berpotensi menimbulkan tekanan psikologis dan membuka peluang kekerasan simbolik. Aspek perlindungan dan kesejahteraan santri menjadi fondasi penting dalam redefinisi pola asuh pesantren.

Santri harus ditempatkan sebagai subjek pendidikan yang memiliki hak atas rasa aman, perlindungan fisik maupun psikologis, serta kesejahteraan sosial. Untuk itu, pesantren perlu membangun regulasi internal yang jelas serta mekanisme pengawasan yang tegas dalam mencegah terjadinya praktik kekerasan. Dengan memastikan lingkungan yang ramah anak, pesantren bukan hanya menjalankan fungsi pendidikan, tetapi juga berperan sebagai institusi yang melindungi, membimbing, dan menumbuhkan generasi Muslim yang berkarakter rahmatan lil 'alamin.

Dimensi krusial dalam pengasuhan anak di lingkungan pesantren terletak pada upaya membangun komunikasi yang harmonis sebagai fondasi kehidupan kolektif. Pola komunikasi yang sehat dan dialogis tidak hanya menciptakan relasi yang egaliter antara pengasuh dan santri, tetapi juga memperkuat iklim sosial yang kondusif bagi pertumbuhan emosional serta spiritual anak. Dalam konteks ini, fungsi pendidikan melalui pengasuhan melampaui sekadar pemenuhan kebutuhan dasar, melainkan diarahkan untuk mengoptimalkan potensi individual

sekaligus menjadi instrumen pewarisan nilai-nilai budaya pesantren.

Pengasuhan di pesantren berperan sebagai agen transformasi sosial-budaya, di mana santri dididik untuk menginternalisasi nilai, norma, serta praktik yang berlaku dalam kehidupan kolektif pesantren. Hal ini menjadikan pengasuhan tidak sekadar aktivitas rutin, tetapi juga mekanisme pedagogis yang memfasilitasi sosialisasi, internalisasi, serta pembentukan identitas kultural. Dengan demikian, proses pengasuhan dapat dipahami sebagai media pembelajaran pola perilaku yang ditopang oleh intensitas interaksi antara santri, ustadz, dan lingkungan pesantren.

Menata Ulang Pola Asuh sebagai Strategi Mitigasi Kekerasan

Pesantren sebagai lembaga pendidikan tradisional Islam memiliki peran penting dalam membentuk kepribadian, moral, serta spiritualitas santri. Namun, dinamika pengasuhan yang terjadi di dalamnya seringkali masih berakar pada pola-pola lama yang sarat dengan pendekatan hierarkis, ketat, bahkan dalam beberapa kasus cenderung represif. Penataan ulang pola asuh tidak berarti meniadakan nilai tradisi pesantren, melainkan melakukan transformasi pendekatan agar lebih adaptif dengan tuntutan zaman. Pola asuh pesantren perlu diarahkan pada model yang menekankan komunikasi dialogis, penghargaan terhadap martabat santri, serta pengembangan potensi individual.

Pendekatan ini berfungsi sebagai strategi mitigasi kekerasan, sebab relasi antara kiai, ustadz, dan santri dibangun atas dasar kepercayaan, keterbukaan, dan rasa hormat, bukan semata-mata hierarki

kekuasaan. Selain itu, pola asuh yang ditata ulang harus memperkuat fungsi pendidikan sebagai proses internalisasi nilai dan transformasi budaya. Kekerasan tidak boleh dilihat sebagai instrumen disiplin, melainkan harus digantikan dengan metode pembinaan berbasis keteladanan, konseling, dan pendekatan psikopedagogis. Dengan demikian, proses pengasuhan di pesantren tidak hanya berorientasi pada pembentukan kepatuhan, tetapi juga pada penguatan karakter, empati, dan resiliensi santri.

Dalam perspektif mitigasi kekerasan, menata ulang pola asuh pesantren juga berarti membangun sistem perlindungan anak yang terintegrasi. Hal ini mencakup penyusunan aturan internal tentang pencegahan dan penanganan kekerasan, pelatihan bagi pengasuh dan pengajar mengenai pendekatan pedagogis non-kekerasan, serta penyediaan ruang aman bagi santri untuk menyampaikan aspirasi atau keluhan.

Upaya ini akan mendorong terciptanya kultur pesantren yang lebih inklusif, partisipatif, dan adaptif terhadap kebutuhan perkembangan anak. Urgensi penataan ulang pola asuh juga didorong oleh meningkatnya kesadaran masyarakat dan regulasi pendidikan nasional mengenai hak anak. Dalam konteks Undang-Undang Perlindungan Anak maupun prinsip *child-friendly education*, pesantren sebagai lembaga pendidikan tradisional dituntut untuk bertransformasi. Selain itu, penataan ulang pola asuh di pesantren juga mendesak karena adanya perubahan karakteristik generasi santri.

Generasi saat ini tumbuh di tengah keterbukaan informasi, perkembangan

teknologi, serta dinamika sosial yang kompleks. Mereka membutuhkan pola pengasuhan yang tidak hanya mengajarkan kepatuhan, tetapi juga mendorong keterampilan berpikir kritis, empati, dan kemandirian emosional. Jika pesantren tidak menata ulang pola asuhnya, ada risiko terjadinya kesenjangan antara metode pendidikan dengan kebutuhan perkembangan santri, yang pada akhirnya berpotensi melanggar praktik kekerasan dan menghambat pertumbuhan pribadi mereka.

Proses penataan ulang pola asuh di pesantren tidak dapat dilepaskan dari kritik terhadap model konvensional yang selama ini dijalankan. Pola asuh tradisional di banyak pesantren pada dasarnya lahir dari kultur paternalistik, di mana kiai atau pengasuh memegang otoritas penuh, sedangkan santri dituntut untuk menunjukkan kepatuhan mutlak. Kritik terhadap pola konvensional tersebut mengemuka seiring berkembangnya wacana pendidikan ramah anak dan pendekatan pedagogi modern.

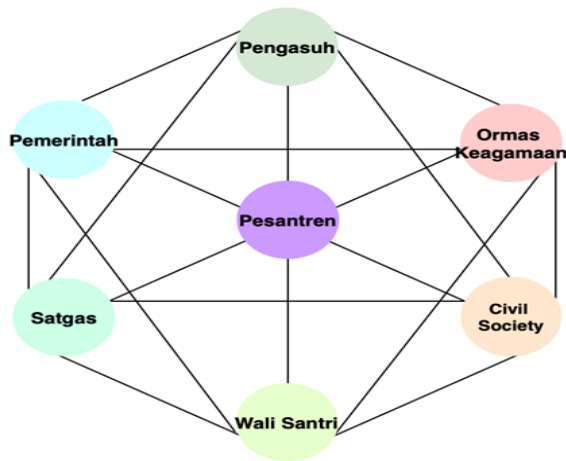
Banyak temuan penelitian mengungkapkan bahwa pola asuh yang keras dan represif tidak hanya gagal membentuk karakter santri, tetapi juga meninggalkan trauma serta menormalisasi budaya kekerasan, yang kemudian hari korban kekerasan juga berpotensi menjadi pelaku. Dalam konteks inilah, penataan ulang pola asuh menjadi kebutuhan mendesak. Kritik terhadap pola lama bukan berarti menegasikan seluruh nilai pesantren, melainkan menekankan perlunya reinterpretasi praktik asuh agar tetap selaras dengan nilai-nilai Islam yang menjunjung kasih sayang.

Peneliti menawarkan model pola asuh Humanis-Integratif. Model pola asuh Humanis-Integratif di pesantren dirancang sebagai respon terhadap kebutuhan menciptakan lingkungan pendidikan yang bebas dari kekerasan, dengan menggabungkan prinsip humanis, edukatif, dan protektif. Pada tataran humanis, keteladanan moral menjadi aspek fundamental, di mana pengasuh dan pendidik dituntut menghadirkan sikap empati, keadilan, serta penghargaan terhadap martabat santri.

Dimensi edukatif tercermin melalui komunikasi yang dialogis dan partisipatif, sehingga hubungan antara pengasuh dan santri tidak sekadar instruktif, melainkan membangun kesadaran kritis dan kemandirian intelektual. Disiplin dalam pola ini tidak lagi dilandasi hukuman keras, melainkan berbasis disiplin humanis yang menekankan kesadaran, tanggung jawab, dan pembiasaan nilai tanpa intimidasi.

Selain itu, pola asuh ini juga menekankan pengembangan potensi santri secara holistik, baik spiritual, intelektual, maupun sosial sehingga santri tidak hanya patuh secara formal, tetapi juga tumbuh sebagai individu yang produktif dan berdaya. Terakhir, dimensi protektif diwujudkan melalui perlindungan dan pemenuhan kesejahteraan santri, dengan menempatkan regulasi internal dan mekanisme pengawasan sebagai instrumen utama untuk mencegah kekerasan. Integrasi kelima aspek tersebut menjadikan pola asuh Humanis-Integratif bukan hanya sebagai pedoman pendidikan, tetapi juga sebagai strategi mitigasi kekerasan yang menjamin keamanan, perkembangan,

dan keberlanjutan kehidupan santri di pesantren.



Sumber: Diolah Peneliti

Dalam mengimplementasikan model tersebut perlu merangkul berbagai aktor kunci. pengasuh, pemerintah, satgas, wali santri, ormas keagamaan, dan civil society. Semua aktor ini saling terhubung satu sama lain. Hal ini menggambarkan sebuah sistem kolaboratif berbasis nilai bersama (shared values) dalam mengelola pola asuh santri. Setiap aktor tidak hanya berhubungan dengan pesantren, tetapi juga saling terhubung satu sama lain, menandakan adanya interaksi kolaboratif dalam membangun pola pengasuhan yang lebih baik.

Model ini menunjukkan bahwa pola asuh di pesantren tidak dapat dipandang semata-mata sebagai relasi langsung antara pengasuh dan santri, melainkan membutuhkan keterlibatan aktor lain untuk membentuk ekosistem yang sehat, aman, dan mendukung perkembangan santri. Keterhubungan tersebut sejalan dengan konsep pola asuh humanis-integratif. Secara humanis, pengasuhan menekankan penghormatan terhadap

martabat santri, menjauhi kekerasan, dan membangun komunikasi empatik. Sementara itu, sifat integratif terlihat dari peran seluruh aktor yang saling melengkapi, pengasuh memberikan teladan, wali santri memperkuat kesinambungan pendidikan antara rumah dan pesantren, pemerintah serta satgas menjamin perlindungan melalui regulasi, ormas keagamaan menjaga nilai-nilai moral keagamaan yang rahmatan lil alamin, dan civil society hadir sebagai pengawas sekaligus mitra dalam advokasi perlindungan santri.

Model ini mendorong pengasuh dan kyai untuk memperkuat peran mereka sebagai teladan moral dan komunikator yang bijak. Mereka dituntut tidak lagi mengandalkan kekerasan sebagai instrumen kedisiplinan, melainkan menumbuhkan kesadaran disiplin melalui pendekatan humanis. Dengan adanya pelatihan khusus terkait komunikasi edukatif dan manajemen konflik, pengasuh memiliki keterampilan praktis dalam membina santri tanpa harus melakukan tindakan represif. Sementara implikasi langsung bagi santri adalah terciptanya iklim belajar yang lebih aman, suportif, dan partisipatif.

Santri tidak hanya memperoleh pengetahuan agama, tetapi juga mengalami proses pendidikan yang memupuk keberanian menyampaikan pendapat, membangun kepercayaan diri, serta menginternalisasi nilai-nilai Islam rahmatan lil-'alamin. Lingkungan yang bebas dari kekerasan memungkinkan mereka mengembangkan potensi akademik, spiritual, maupun sosial secara optimal. Tidak hanya itu, penerapan pola asuh Humanis-Integratif menuntut

pesantren untuk menyusun regulasi internal dan mekanisme pengawasan yang jelas dalam mencegah kekerasan. Hal ini dapat berupa kode etik pengasuhan, mekanisme pelaporan santri, hingga pembentukan unit pengawasan yang melibatkan santri senior, ustadz, maupun pengurus pesantren. Dengan cara ini, pesantren mampu membangun citra positif sebagai lembaga pendidikan yang adaptif terhadap perubahan zaman dan selaras dengan prinsip perlindungan anak.

Sedangkan, implikasi model ini juga memperluas peran orang tua dan masyarakat dalam mendukung proses pengasuhan di pesantren. Orang tua tidak hanya menitipkan anak, tetapi juga dapat dilibatkan dalam forum komunikasi dengan pengasuh guna memastikan keberlanjutan nilai-nilai pendidikan di rumah. Masyarakat sekitar pesantren pun dapat berperan dalam memperkuat fungsi pesantren sebagai agen transformasi budaya yang damai dan inklusif.

Kesimpulan

Penelitian ini menegaskan bahwa praktik pola asuh di pesantren tidak lepas dari problematika serius berupa kekerasan yang cenderung terinstitusional dan dianggap sebagai bagian dari tradisi pendidikan. Fenomena ini menunjukkan adanya perbedaan pemaknaan pola asuh dalam budaya pesantren, di mana kedisiplinan sering kali diterjemahkan secara represif sehingga mengabaikan dimensi kemanusiaan santri.

Kondisi tersebut berimplikasi pada munculnya praktik kekerasan, baik verbal, fisik, maupun psikologis, yang secara tidak langsung menurunkan kualitas

pengasuhan dan mencederai tujuan pendidikan pesantren sebagai ruang pembentukan akhlak mulia. Sebagai respons terhadap persoalan ini, penelitian ini menawarkan redefinisi pola asuh pesantren melalui model Humanis-Integratif yang berlandaskan lima aspek utama: keteladanan moral, komunikasi edukatif, disiplin humanis, pengembangan potensi santri, serta perlindungan dan kesejahteraan santri.

Model ini menekankan bahwa pengasuhan di pesantren harus berpijak pada penghargaan terhadap martabat santri sekaligus mengintegrasikan peran multipihak, termasuk pengasuh, wali santri, pemerintah, ormas keagamaan, civil society, dan satgas perlindungan anak.

Sinergi kolaboratif ini tidak hanya memperkuat fungsi pesantren sebagai lembaga pendidikan, tetapi juga menjadikannya ruang pengasuhan yang aman, inklusif, dan bebas dari kekerasan. Redefinisi pola asuh pesantren bukan sekadar perubahan teknis dalam praktik pengasuhan, melainkan transformasi paradigma menuju sistem pendidikan berbasis nilai-nilai humanis dan protektif.

Implementasi pola asuh Humanis-Integratif diyakini mampu menjadi strategi efektif dalam memitigasi kekerasan terhadap santri, serta mendorong pesantren menjadi teladan bagi lembaga pendidikan lain dalam mewujudkan lingkungan belajar yang ramah anak dan berkeadilan.

Daftar Pustaka

- Aprilia, D. C., Mu'ti, A., & Sururin, S. (2022). Kekerasan Seksual di Lingkungan Pesantren. *Journal on Education*, 5(1), 662–675.

- Arifin, B. (2024). Relasi Interpersonal Relasi Interpersonal Santri Pondok Pesantren Mansyaul Ulum Ganjaran Gondanglegi Malang. *Jurnal Studi Pesantren*, 4(2), 1–19.
- Dewantoro, M. B. W. (2020). *Relasi Kuasa Kiai Terhadap Santri Di Pondok Pesantren (Studi Tentang Praktik Dominasi Dalam Relasi Kuasa Di Pondok Pesantren Qomaruddin Sampurnan Bungah Gresik)*. UNIVERSITAS AIRLANGGA.
- Ernawati, S. (2022). Bullying dan Mental Hygieni Santri di Pondok Pesantren Jember. *Jurnal Educazione: Jurnal Pendidikan, Pembelajaran Dan Bimbingan Dan Konseling*, 10(2), 123–133.
- Gunawan, A., Rifai, A., Subroto, G., Pakendek, A., Wardani, W. Y., & Wahyono, S. (2024). Pencegahan Tindakan Kekerasan Dalam Pendidikan Pesantren. *Jurnal Akademik Pengabdian Masyarakat*, 2(1), 104–111.
- Hania, I., Mubin, M. N., Suharsono, S., & Abdillah, I. (2022). Pengaruh Relasi Guru Murid terhadap Pembentukan Kepribadian Santri Pondok Pesantren Darur Rohman Krandon Kudus. *Proceeding Annual Conference on Islamic Religious Education*, 2(1).
- Hasan, M., Harahap, T. K., Hasibuan, S., Rodliyah, I., Thalhah, S. Z., Rakhman, C. U., Ratnaningsih, P. W., Mattunruang, A. A., Silalahi, D. E., & Hasyim, S. H. (2023). Metode penelitian kualitatif. *Penerbit Tahta Media*.
- Hidayatullah, A. (2024). Altruisme dalam Relasi Dakwah Kaum Sayyid dan Kyai di Rembang Jawa Tengah. *Jurnal At-Taghyir: Jurnal Dakwah Dan Pengembangan Masyarakat Desa*, 6(2), 207–238.
- Mustofa, M. (2017). Analisis Disiplin Dan Kuasa Tubuh Michel Foucault Dalam Kehidupan Santri Pondok Kebon Jambu Al-Islamy Pesantren Babakan Ciwaringin Cirebon. *JURNAL YAQZHAN: Analisis Filsafat, Agama Dan Kemanusiaan*, 3(1), 158–172. <https://doi.org/10.24235/jy.v3i1.2128>
- Nashihah, H. (2022). RELASI KUASA KYAI DAN SANTRI DI PONDOK PESANTREN AL-MUNAWWIR KOMPLEK Q KRAPYAK YOGYAKARTA. UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.
- Natsir, A., & Rohman, K. (2024). Kekerasan di Pondok Pesantren: Aktor, Motif, dan Sebaran Geografis. *Dinamika Penelitian: Media Komunikasi Penelitian Sosial Keagamaan*, 24(01), 1–18.
- Nurish, A. (2019). Dari Fanatisme Ke Ekstremisme: Ilusi, Kecemasan, Dan Tindakan Kekerasan. *Jurnal Masyarakat Dan Budaya*, 21(1), 31–40. <https://doi.org/https://doi.org/10.14203/jmb.v21i1.829>
- Pebriaisyah, B. F., Wilodati, W., & Komariah, S. (2022). kekerasan seksual di lembaga pendidikan keagamaan: Relasi kuasa kyai terhadap santri perempuan di pesantren. *Sosietas: Jurnal Pendidikan Sosiologi*, 12(1), 1–14.
- Rofidah, L., & Syam, N. (2021). Fenomenologi Relasi Santri-Kiai

di Pesantren:: Motif Nata Sandal di
Kalangan Santri. *Jurnal TARBAWI*,
10(1), 33–48.

Sobari, W. (2023). *Template Penulisan Metode
Penelitian* (I. Publisher, Ed.; 1st ed.,
Vol. 2, Issue 1).

Tawakkal, G. T. I. (2023). *Metodologi
Penelitian Sosial Dasar*. UB Press.